

**Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen
Tahun 2012 - 2013
(Studi Kasus Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Sragen)**

Oleh:

Ardian Yudi Prananto (14010110130100)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Poverty reduction policies which conducted by UPT-PK become a good innovation to help poor people in Sragen to meet their basic needs. Programs provided in either the health, education, and socio and conomic sector are capable of providing benefits and advantages for poor people, thus it become a manifestation of government concern towards poor people.

Practice the existing poverty reduction process is always done based on Standard Operating Procedure (SOP). With the existing procedure, the poverty services will be systematically served in one place (one stop service). Verification mechanism generates database completely valid and trustworthy, so that the goal of the poverty reduction will be reached. The existence of a partnership with the agency or company is able to simultaneously support an optimize all types of existing programs.

Commitment to poverty reduction programs given is designed so that the poor have easy access in terms of basic needs. In addition to existed program, UPT-PK should further develop promoting community-based programs so that communities also take an active role in improving their lives.

Keywords : UPT-PK, Poverty Reduction, Policy, Programs

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah atau persoalan mendasar yang menjadi perhatian oleh pemerintah di belahan negara manapun. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan memang masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini, sehingga suatu negara ataupun daerah harus melakukan terobosan kaitannya dengan kebijakan yang mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu daerah yang telah melaksanakan inovasi kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen membuat kebijakan dengan menciptakan terobosan dengan membentuk suatu unit penanggulangan kemiskinan yang dinamakan dengan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK). Pembentukan lembaga yang khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini dilandasi dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2012, tentang Pembentukan UPT-PK Kabupaten Sragen.

Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Sragen memberikan layanan bagi masyarakat miskin secara komprehensif, yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi merupakan suatu masalah klasik yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Berlatar belakang dari masalah ini, sebagaimana telah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2012 UPT-PK mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, penanganan, dan

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Selain itu, alasan dibentuknya UPT-PK di Kabupaten Sragen ini karena melihat cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sragen. Dari 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 208 desa dan kelurahan, masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sragen berdasarkan data yang dikeluarkan oleh TNP2K yakni sebanyak 308.783 jiwa atau 87.768 KK. Dikatakan tinggi karena Kabupaten Sragen telah menetapkan angka kemiskinan menjadi 10% pada tahun 2015 menjadi tujuan dari dibentuknya UPT-PK ini sehingga target tersebut dapat tercapai¹.

Dalam programnya, UPT-PK memiliki kartu Saraswati dan Sintawati dengan tiga jenis klasifikasi dan kegunaan kartu yang berbeda, yaitu Melati, Menur dan Kenanga. Kartu Saraswati adalah kartu untuk semua masyarakat miskin (miskin) yang berfungsi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan Sintawati merupakan kartu untuk siswa miskin yang berprestasi guna untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian, juga masih banyak program lain seperti Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi, Ruselawati atau bedah rumah, Sangduta (Santunan Duka Cita), Pakesra (Paguyuban Kesejahteraan Rakyat) dan masih banyak lainnya.

Dalam implementasinya suatu kebijakan sangat jarang di lakukan evaluasi. Berangkat dari sinilah pentingnya evaluasi dilakukan. Evaluasi lebih menekankan pada suatu kebijakan atau program itu dijalankan. Sehingga para pembuat kebijakan mengetahui apa kekurangan-kekurangan dalam proses pelaksanaan program tersebut.

¹ *Sragen Melawan Kemiskinan* oleh Tri Rahayu, dkk, dalam Solo Pos, Jumat 25 Mei 2012

Melihat kebijakan pembentukan UPT-PK merupakan inovasi baru dalam penanggulangan kemiskinan yang baru berdiri dan telah diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pembentukan unit ini, maka sangat penting untuk dilakukan evaluasi untuk mengetahui program ini berjalan, sehingga kebijakan ini nantinya bisa berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan oleh UPT-PK?
2. Bagaimana hasil UPT-PK, apakah sesuai dengan tujuan UPT-PK?
3. Apa hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan kebijakan UPT-PK?
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah proses pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh UPT-PK, menjelaskan kesesuaian antara hasil dari UPT-PK dengan tujuan dari dibentuknya UPT-PK, menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan UPT- PK dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan UPT-PK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), teori kebijakan publik yang didalamnya mencakup evaluasi kebijakan dan evaluasi implementasi atau proses, dan teori kemiskinan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan observasi, *interview* atau wawancara mendalam untuk menggali informasi sedalam-dalamnya, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposeful sampling*, yaitu peneliti memilih subjek penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau memahami permasalahan pokok yang akan diteliti dan disesuaikan dengan tujuan penelitian². Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK), Kasubbag TU, Kepala dan anggota SKPD Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi, dan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, dan masyarakat yang menjadi target kebijakan dari seksi Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Ekonomi. Fokus penelitiannya adalah mengungkap proses pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh UPT-PK.

B. PEMBAHASAN

B.1 Input

B.1.1 *Standart Operating Procedure (SOP)*

SOP merupakan petunjuk untuk melaksanakan pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan. SOP ini berfungsi agar dalam memberikan proses pelayanan, UPT-PK mempunyai petunjuk dan standar yang jelas, sehingga hasilnya dapat maksimal. Dalam proses penanggulangan kemiskinan yang ada di UPT-PK, baik di

² Haris Herdiansyah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 106

seksi kesehatan, pendidikan maupun sosial ekonomi, selalu berpegangan pada *Standart Operating Procedure* (SOP) yang telah dibuat sebelumnya. Program-program pokok seperti Saraswati, Sintawati, Ruselawati, dan Sangduta mempunyai SOP masing-masing. Di dalam SOP yang telah di bentuk, di dalamnya berisi mengenai tujuan adanya setiap program, kemudian prosedur pelaksanaan, seperti berkas persyaratan yang harus dilengkapi, ketepatan waktu dalam menghasilkan produk yang diajukan, beserta pembiayaan dari program tersebut,

B.1.2 Sumber Daya Manusia

Kaitannya dengan sumber daya manusia, disini merupakan ketersediaan para petugas atau pegawai UPT-PK yang bekerja melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Sampai saat ini, UPT-PK Kabupaten Sragen dalam melaksanakan proses pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan terdiri dari 23 personil (diperbantukan dari SKPD asal ke UPT-PK). Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2012, petugas UPT-PK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Karena UPT-PK merupakan suatu unit yang baru di bentuk, petugas atau pegawai UPT-PK berasal dari satuan kerja yang ada di Kabupaten Sragen yang berhubungan dengan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Di seksi kesehatan misalnya, petugasnya berasal dari satuan kerja seperti RSUD, Dinas Kesehatan. Sedangkan di seksi pendidikan, petugasnya berasal dari satuan kerja Dinas Pendidikan, Kesra (Kesejahteraan Rakyat). Dan untuk seksi sosial dan ekonomi petugasnya berasal dari satuan kerja Disperinkop (Dinas Perindustrian dan Koperasi) UMKM, SDA. Petugas yang berasal dari satuan kerja ini

dimaksudkan karena petugas dari satuan kerja itulah yang sudah mengetahui alur pelayanannya, sehingga dalam proses memberikan pelayanannya dapat dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.

B.1.3 Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial disini merupakan ketersediaan finansial atau anggaran yang digunakan UPT-PK dalam memberikan dan melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Berikut merupakan tabel detail anggaran data kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada di UPT-PK.

Tabel 1.1
Anggaran Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan

1.	Anggaran Jamkesda	
	a. Tahun 2012	Rp 8.500.000.000,00
	b. Tahun 2013	Rp 10.500.000.000,00
2.	Anggaran Beasiswa Mahasiswa Miskin	
	a. Tahun 2012	Rp 200.000.000,00
	b. Tahun 2013	Rp 447.200.000,00
3.	Beras Miskin	
	a. Tahun 2012	83.366 RTS 1.250.490 kg
	b. Tahun 2013	69.420 RTS 1.041.300 kg
4.	Santunan Uang Duka Cita	
	c. Tahun 2012	Rp 1.200.000.000,00
	d. Tahun 2013	Rp 1.231.000.000,00
5.	Ruselawati/ Pemugaran RTLH, Tahun 2012	Rp 4.092.500.000,00
	Ruselawati/ Pemugaran RTLH, Tahun 2013	Rp 4.900.000.000,00

Karena sejauh ini UPT-PK tingkatnya masih unit, maka dalam hal pengelolaan anggaran tidak dapat dilakukan sendiri. Konsekuensi yang diterima UPT-PK adalah UPT-PK tidak dapat mengelola anggaran secara otonom, karena tingkatnya masih unit. Beda halnya jika sudah menjadi kantor, dinas atau badan dimana dapat mengelola anggaran secara otonom. Contohnya seperti pada seksi kesehatan ada jamkesda atau Saraswati. Anggaran Saraswati yang merupakan inovasi dari jamkesda ini dikelola oleh Dinas Kesehatan, artinya segala jenis pengeluaran yang di timbulkan karena adanya kartu Saraswati itu di klaimkan kepada Dinas Kesehatan.

Dengan demikian, karena status kelembagaan UPT-PK yang masih berstatus unit, dalam mengelola jenis program pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan anggaran tidak bisa di kelola sendiri. Selain itu, dalam hal anggaran program-program yang ada sejauh ini juga di eksekusi di SKPD terkait. Program Saraswati misalnya, dengan adanya program Saraswati segala pembiayaan yang di kenakan kepada masyarakat miskin yang sakit di klaimkan kepada Dinas Kesehatan, karena program Saraswati ini merupakan program yang berkaitan dengan kesehatan.

B.1.4 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana disini meliputi sarana teknologi telekomunikasi dan informatika, kendaraan operasional, serta kemudahan dan kenyamanan yang disediakan oleh UPT-PK kepada pemohon dalam pelaksanaan pelayanannya. Sejauh ini, fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masih cukup terbatas. Dari kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan survey masih

berjumlah empat sepeda motor, dan ambulance yang digunakan untuk kebutuhan *emergency* masih berjumlah 1 mobil ambulance. Tetapi, dalam hal kemudahan dan kenyamanan kaitannya dengan pencetakan kartu, rekomendasi yang dimohonkan pengaju, ketika hasil sudah keluar dapat dipastikan kartu sudah jadi. Karena setelah petugas yang melakukan survey, hari berikutnya permintaan yang diajukan sudah dapat diketahui hasilnya dan masyarakat hanya perlu datang untuk mengajukan dan mengambil hasilnya saja.

B.2 Proses

B.2.1 Sosialisasi Program

Dari sejak berdirinya UPT-PK hingga saat ini, pelaksanaan pelayanan, penanganan, penanggulangan kemiskinan oleh UPT-PK diawali dengan kegiatan sosialisasi program di tingkat desa hingga kecamatan se-Kabupaten Sragen. Tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut yaitu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin jika di Kabupaten Sragen mempunyai unit khusus yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Sosialisasi yang dilakukan yaitu menjelaskan program-program seperti Saraswati, Sintawati, Beasiswa, Ruselawati, Sangduta, dll. Selain itu juga untuk meningkatkan peranan media massa untuk mendukung keberadaan UPT-PK dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Sragen.

Sosialisasi dilakukan dengan langkah-langkah strategis, seperti sosialisasi dilakukan melalui media massa. Misalnya melalui TV yaitu TATV, Radio Buana Asri, dan media cetak Solopos. Bahkan sosialisasi juga dilakukan oleh Bupati Sragen

sendiri setiap minggunya dalam acara Srawung Bupati di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Dalam acara Srawung Bupati tersebut, masyarakat dapat secara langsung berinteraksi dengan Bupati kaitannya dengan program-program yang ada di dalam UPT-PK.

B.2.2 Proses Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, UPT-PK mempunyai alur pelayanan yang telah ditetapkan. Alur pelayanan ini berfungsi untuk lebih memudahkan atau melancarkan program yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdapat di Kabupaten Sragen. Dengan memahami alur mekanisme kerja ini, para masyarakat miskin di Kabupaten Sragen akan dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan dari pihak UPT-PK, sehingga para masyarakat miskin benar-benar dapat terbantu dan merasakan wujud kepedulian dari pemerintah kepada masyarakat miskin sesuai dengan tugas dari UPT-PK, yaitu untuk melaksanakan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Masyarakat miskin yang datang ke UPT-PK beserta dengan perabot syarat-syarat yang telah ditetapkan menuju ke seksi yang menjadi tujuan, apakah seksi kesehatan, pendidikan maupun sosial ekonomi. Kemudian masyarakat yang melakukan pengajuan akan di cek database induk atau database yang dari pusat/TNP2K. Jika ada, kemudian akan dilayani dan diproses di tim teknis seksi tujuan, dan kemudian akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan program yang telah diajukan seperti Saraswati, Sintawati, Beasiswa, Ruselawati, Sangduta, dll. Khusus

untuk Saraswati dan Sintawati, yang telah diberikan rekomendasi kemudian akan dibuatkan kartu untuk memudahkan dalam hal administrasi.

Diawali dari masyarakat yang melakukan pengajuan kemudian di cek database induk atau database yang dari pusat/ TNP2K dan hasilnya tidak ada, pihak UPT-PK akan mendata dulu, dan kemudian petugas UPT-PK akan melakukan survey langsung ke lapangan atau rumah yang melakukan pengajuan dengan membawa form validasi standar UPT-PK untuk menilai tingkat kemiskinannya dilihat dari kriteria kondisi keluarga, rumah, maupun ekonominya. Apabila lolos dan benar-benar dinyatakan tidak mampu maka UPT-PK akan memberikan rekomendasi dan bantuan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan. Dengan adanya survey langsung tersebut, data kemiskinan menjadi lebih valid karena berdasarkan *by name by address*. Artinya, masyarakat yang melakukan pengajuan dan lolos verifikasi UPT-PK benar-benar masyarakat yang miskin dimana dapat dibuktikan dari nama dan tempat tinggal.

Dalam melakukan survey langsung ke lapangan atau ke tempat masyarakat yang mengajukan permohonan, pihak UPT-PK selalu berpegangan pada form survey validasi yang telah dibuat. Form survey validasi tersebut menjadi patokan untuk menentukan lolos tidaknya masyarakat yang melakukan pengajuan untuk menerima kartu, baik Saraswati/Sintawati Menur.

Dalam form survey validasi tersebut terdapat 20 kriteria untuk dapat menentukan skor tingkat kemiskinannya. Mulai dari jumlah anggota keluarga yang dapat menggambarkan kondisi keluarganya, artinya jika masyarakat miskin

mempunyai anggota keluarga yang banyak, maka beban hidup yang dialami juga semakin besar. Sedangkan dalam kondisi rumah terdapat beberapa kriteria, seperti status kepemilikan, luas bangunan, material atap, lantai, dinding, sumber air bersih, toilet, sumber penerangan, bahan bakar dapur, perabot rumah, dan transportasi. Dari kriteria inilah, nantinya UPT-PK dapat menilai bagaimana kondisi rumah yang menjadi tempat tinggal masyarakat miskin yang melakukan pengajuan. Dan kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi juga terdapat beberapa kriteria, seperti pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, total penghasilan keluarga dalam satu bulan, keluarga yang sakit kronis/menahun, dan asset yang dimiliki dan dapat dijual dalam waktu cepat. Kriteria-kriteria ini nantinya dapat menggambarkan seperti apa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang melakukan pengajuan. Semakin kecil nilai dari setiap kriteria, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan semakin miskin, begitupun sebaliknya. Darinilai-nilai itu nantinya akan dijumlahkan untuk menentukan berapa skor yang telah diperoleh, apakah 20-30 yang berarti SM (sangat miskin), 31-40 berarti M (miskin), 41-50 berarti HM (hampir miskin) ataukah 51-60 yang berarti mampu. Dari skor itulah nanti dapat diketahui tingkat kemiskinannya, apakah sangat miskin, miskin, atau hampir miskin, dan mampu. Form validasi yang di dalamnya terdapat 20 kriteria tersebut merupakan pengembangan dari 14 kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS. Pengembangan kriteria tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang detail dan benar-benar valid di lapangan.

Untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan dapat dipercaya dan untuk *updating database* kemiskinan, UPT-PK mempunyai langkah yang dinamakan

dengan validasi data. Validasi data dilakukan untuk mendapatkan data yg valid dan akurat agar dalam menganalisa perencanaan, pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Selain itu juga untuk mengatasi masalah *inclusion error* dan *exclusion error*. Validasi data ini akan dilakukan setiap dua tahun sekali, yang diharapkan dapat untuk selalu *update* data masyarakat miskin yang ada.

B.2.3 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPT-PK

Dalam menjalankan tugasnya, UPT-PK mempunyai banyak fungsi. Yang pertama adalah pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan. Di UPT-PK, setiap data yang masuk dikaji terlebih dahulu, di analisis langsung ke lapangan. Artinya proses ini meliputi peninjauan langsung ke lapangan dengan melihat seperti apa kondisi di lapangan. Data di analisis kemudian dicocokkan dengan hasil di lapangan apakah nyata, betul atau tidak. Kemudian fungsi kedua adalah perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan. Disini, UPT-PK setelah melakukan analisis, lalu merumuskan kebijakan yang mana wujud dari mengambil tersebut adalah apakah masyarakat yang melakukan pengajuan akan mendapatkan bantuan apa, perlu penanganan yang bagaimana, menetapkan tingkat kemiskinannya atau perlu mendapatkan rekomendasi, atau terkait dengan penetapan skor miskin untuk menentukan layak tidaknya di terbitkan kartu Saraswati, Sintawati, lolos tidaknya mendapat beasiswa dan sebagainya. Serta Fungsi ketiga yaitu pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait. Sejauh ini UPT-PK selalu berkoordinasi dengan SKPD terkait, kaitannya

dengan kasus apa yang diajukan oleh masyarakat selalu dikoordinasikan. Misalnya bedah rumah atau Ruselawati dengan Dinas Sosial, beasiswa dengan bagian Kesejahteraan Rakyat, dsb. Kemudian fungsi keempat yaitu penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas. Apabila ada masyarakat yang melakukan pengaduan, UPT-PK akan menangani sesuai bidang tugas masing-masing, baik di seksi data pelaporan, kesehatan, pendidikan maupun sosial dan ekonomi. Tapi, dengan adanya pengkajian, analisis, perumusan kebijakan, seseorang tidak bisa semena-mena mengadu, karena UPT-PK berpegangan pada SOP dan aturan yang berlaku. Fungsi yang kelima adalah pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) database kemiskinan sesuai bidang tugas. Updating database yang dilakukan adalah kaitannya dengan validasi data, dimana UPT-PK selalu akan melakukannya dua tahun sekali. Tapi, bentuk verifikasi atau survey terjun ke lapangan termasuk merupakan salah satu bagian dari *updating* data.

B. 2.4 Kemitraan UPT-PK

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh UPT-PK, UPT-PK juga turut menggendong badan atau perusahaan untuk ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Selain untuk memberikan kepedulian sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial disekitarnya, peran CSR (*Corporate System Responsibility*) ataupun kemitraan disini diharapkan dapat membantu UPT-PK secara bersama-sama untuk melakukan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sragen. Adanya kemitraan dari pemerintah daerah dengan badan/perusahaan, komitmen perusahaan atau badan yang

ada di Kabupaten Sragen untuk ikut berperan serta dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen cukup baik. Hal ini dapat digambarkan melalui bantuan-bantuan yang diberikan kepada UPT-PK untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat miskin, seperti pemberian bantuan tambahan dana, fasilitas dan sebagainya.

B.3 Outputs

B.3.1 Hasil yang Dicapai dan Produk yang Di Hasilkan

Dengan adanya program-program seperti Saraswati, Sintawati dsb, UPT-PK telah memberikan rekomendasi kepada banyak masyarakat miskin di Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui hasil yang dicapai hingga saat ini, maka harus melihat dari tujuan dari setiap program apakah tujuan yang diharapkan dari setiap program sudah tercapai sesuai dengan tujuan adanya seksi kesehatan. Tujuan dari adanya program Saraswati belum sepenuhnya tercapai, karena sejauh ini belum memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan, tetapi hanya melindungi kesehatan masyarakat, menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, dan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem jaminan kesehatan yang lebih baik dan menyetatkan masyarakat miskin yang sakit kemudian dapat kembali bekerja dan menghasilkan ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan sudah banyaknya UPT-PK memberikan Kartu Saraswati baik Melati, Menur dan Kenanga, meskipun belum genap 2 tahun UPT-PK berdiri. Sampai bulan Oktober 2013, UPT-PK telah menerbitkan kartu Saraswati Melati sebanyak 309.072 kartu,

Saraswati Menur sebanyak 45.304 kartu, dan Saraswati Kenanga sebanyak 22.555 kartu.

Sedangkan untuk seksi pendidikan yang mempunyai program pokok Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Sintawati hingga saat ini hasilnya juga belum kelihatan, karena untuk di pendidikan hasil yang dilihat lebih ke masa depannya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru dan dapat memotong rantai kemiskinan. Sejauh ini, hasil yang dicapai adalah orang miskin terus menjadi dapat bersekolah, dan semangat motivasi orang miskin belajar semakin tinggi, baik dari Sekolah Dasar hingga PTN, sehingga adanya UPT-PK untuk memfasilitasi masyarakat miskin yang masih ingin bersekolah baik dari SD hingga PTN. Tujuan membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan itu sudah tercapai. Buktinya, UPT-PK berkomitmen mengeluarkan program-program seperti Beasiswa dan Sintawati. Sampai dengan bulan Oktober 2013, untuk beasiswa mahasiswa miskin PTN, UPT-PK sudah melayani 142 pemohon, dimana dari total tersebut yang lolos dan berhak mendapatkan beasiswa sebanyak 67 mahasiswa, dengan rincian untuk tahun 2012 sebanyak 31 mahasiswa, dan tahun 2013 sebanyak 36 mahasiswa. Sedangkan pada program Sintawati, sampai bulan Oktober 2013 UPT-PK telah menerbitkan kartu Sintawati Melati sebanyak 81.976, Menur sebanyak 4247 kartu, dan Kenanga sebanyak 261 kartu.

Di seksi sosial dan ekonomi, yang mempunyai program pokok Ruselawati dan Sangduta. Tujuan dengan adanya program Ruselawati adalah meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin dan/ atau keluarga tidak mampu, meningkatkan

kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan terhadap anggota keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga miskin dan/atau keluarga tidak mampu. Sedangkan tujuan dari program Sangduta adalah dapat mewujudkan rumah yang sehat dan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. Sejauh ini, untuk program Ruselawati dan Sangduta, hasil yang sudah dicapai adalah untuk bantuan Sangduta pada tahun 2012 sudah memberikan 1.299 bantuan, dan tahun 2013 tahap pertama sebanyak 1.412 bantuan. Sedangkan untuk program Ruselawati, pada tahun 2012 sudah memberikan 1.029 bantuan, dan untuk tahun 2013 sebanyak 1.214 bantuan. Dan untuk bantuan Raskin, pada tahun 2013 ini sudah memberikan 1.041.300 kg beras.

B.3.2 Outcomes

Dampak disini dilihat dari dampak positif dan negatif adanya kebijakan pembentukan UPT-PK dengan program-program pelayanan terpadu satu pintu yang telah di buat untuk menyejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Sragen. Program-program yang dibuat apakah benar-benar dirasakan masyarakat miskin atau tidak. Adanya UPT-PK dengan berbagai program yang diberikan ini mempunyai dampak positif, antara lain : (1) dengan adanya program tersebut masyarakat merasa terbantu dan dimudahkan; (2) masyarakat hanya tidak harus terhambat birokrasi, karena hanya datang ke UPT-PK; (3) adanya jaminan baik di bidang kesehatan maupun pendidikan dan social ekonomi. Ini bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dengan secara langsung merasakan manfaat yang diberikan.

Sedangkan untuk dampak negatifnya dengan program-program yang dimiliki, sejauh ini UPT-PK banyak memberikan program bantuan. Itu artinya, bantuan-bantuan tersebut akan membuat masyarakat merasa dimanjakan. Dalam program Ruselawati misalnya, masyarakat yang mempunyai rumah kurang layak akan mendapatkan bantuan pemugaran rumah yang layak huni. Begitu juga dengan raskin. Walaupun merupakan program nasional, tetapi akan mengurangi semangat masyarakat miskin untuk bekerja lebih keras, karena lagi-lagi masyarakat dimanjakan oleh pemerintah. Akan lebih baik bila program-program yang ada lebih untuk memberdayakan masyarakatnya, sehingga selain dukungan pemerintah masyarakatnya sendiri juga tergerak untuk semangat memperbaiki kondisi kehidupannya.

B.4 Hambatan-hambatan yang di alami dan Upaya untuk Mengatasi

B.4.1 Hambatan-hambatan

Dalam melaksanakan tugas pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, UPT-PK pasti mempunyai hambatan-hambatan. Sejauh belum sampai 2 tahun berdirinya hingga sekarang, hambatan yang dialami oleh UPT-PK dalam menjalankan tugasnya adalah (1) sarana dan prasarana; (2) anggaran; (3) SDM. Kaitannya dengan sarana dan prasarana misalnya kendaraan operasional, seperti kendaraan untuk survey lapangan, ambulance, kemudian juga computer. kaitannya dengan anggaran, karena tingkatnya masih unit jadi masalah dalam pencairan anggaran masih cukup lama, belum lagi adanya penghimpunan data yang dihimpun satu tahap, tentu akan membutuhkan waktu yang lama. kaitannya dengan

SDM lebih menekankan pada jumlah petugas UPT-PK. Saat ini dalam melaksanakan tugasnya, petugas UPT-PK hanya 23 orang, di bagi ke empat seksi yang ada. Jumlah 23 orang tersebut selain melayani masyarakat juga harus melakukan survey langsung lapangan ke rumah pemohon se-Kabupaten Sragen.

B.4.2 Upaya untuk Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan saat proses pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh UPT-PK tersebut, upaya-upaya yang dilakukan oleh UPT-PK adalah dengan cara menggandeng beberapa elemen, seperti DPRD Kabupaten Sragen. Dalam hal sarana dan prasarana, pihak UPT-PK sudah mengajukan ke pemerintah terkait untuk menambah kendaraan operasional. Kemudian kaitannya dengan anggaran, lamanya waktu pencairan itu karena adanya aturan pembagian dua tahap dalam satu tahun. Artinya, setiap data yang masuk akan dihimpun terlebih dahulu untuk lebih memudahkan prosesnya. Walaupun memakan waktu yang lama, tapi dengan dikoordinasikan dengan dinas terkait akan lebih memudahkan dalam waktu eksekusi bantuannya. Sedangkan untuk jumlah anggaran dalam hal pendidikan, UPT-PK juga selalu melakukan dengan badan anggaran DPRD Kabupaten agar lebih banyak lagi jumlah mahasiswa miskin berprestasi yang menerima. Untuk pengelolaan anggaran, karena UPT-PK masih berstatus sebagai unit, UPT-PK tidak bisa secara otonom untuk mengelolanya, sehingga koordinasi dengan dinas terkait menjadi upaya yang tepat untuk hal pengelolaan. Sedangkan dalam hal SDM terkait masih sedikitnya jumlah petugas yang ada dalam hal melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Sragen, UPT-PK tidak bisa berbuat banyak, karena pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen, semua petugas UPT-PK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Sehingga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah memaksimalkan petugas yang ada, baik dalam melayani di kantor maupun untuk survey langsung ke lapangan. Sedangkan agar tidak hanya masyarakat miskin yang mengajukan yang dilayani, UPT-PK sudah mengatasinya dengan melakukan validasi data. Dimana petugas UPT-PK terjun langsung ke lapangan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat menentukan tingkat kemiskinan seseorang.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Belum lama lembaga ini berdiri, dapat terlihat bahwa hadirnya UPT-PK sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sragen. Ini dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai saat ini, dimana masyarakat miskin sangat membutuhkan adanya lembaga baru yang khusus untuk menanggulangi kemiskinan, baik di seksi kesehatan, pendidikan maupun social ekonomi.

Dari hasil kajian diatas, maka penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh UPT-PK lebih jelasnya diuraikan dalam poin-poin dibawah ini :

1. Proses pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang bersifat komprehensif yang dilakukan oleh UPT-PK melalui program-program yang diberikan baik di seksi kesehatan, pendidikan maupun sosial dan ekonomi

sejauh ini berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dari adanya pelayanan pada program-program yang diberikan selalu berlandaskan *Standart Operating Procedure* (SOP) dan alur pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Hasil dari adanya program-program yang diberikan sekarang ini sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sedikit demi sedikit akan dapat mencapai tujuan tersebut. UPT-PK sudah mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat miskin. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya kartu Saraswati yang sudah tercetak, dan sasaran program lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar miskin. *Database* yang dimiliki UPT-PK juga menjadi lebih valid, sehingga masalah *inclusion error* dan *exclusion error* dapat terselesaikan dan program-program kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal sejauh ini berjalan baik dan tepat sasaran.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, hambatan yang dialami oleh UPT-PK terbagi dalam tiga hal, yaitu sarana dan prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal sarana dan prasarana masih terbatas. Dalam hal anggaran, terkait dengan pengelolaan anggaran yang sejauh ini tidak bisa dilakukan secara otonom karena status kelembagaannya yang tingkatnya masih unit. Dalam sumber daya manusia terkait dengan masih sedikitnya jumlah petugas yang ada dalam hal melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen, sehingga sejauh ini UPT-PK hanya melayani masyarakat miskin yang mengajukan saja.

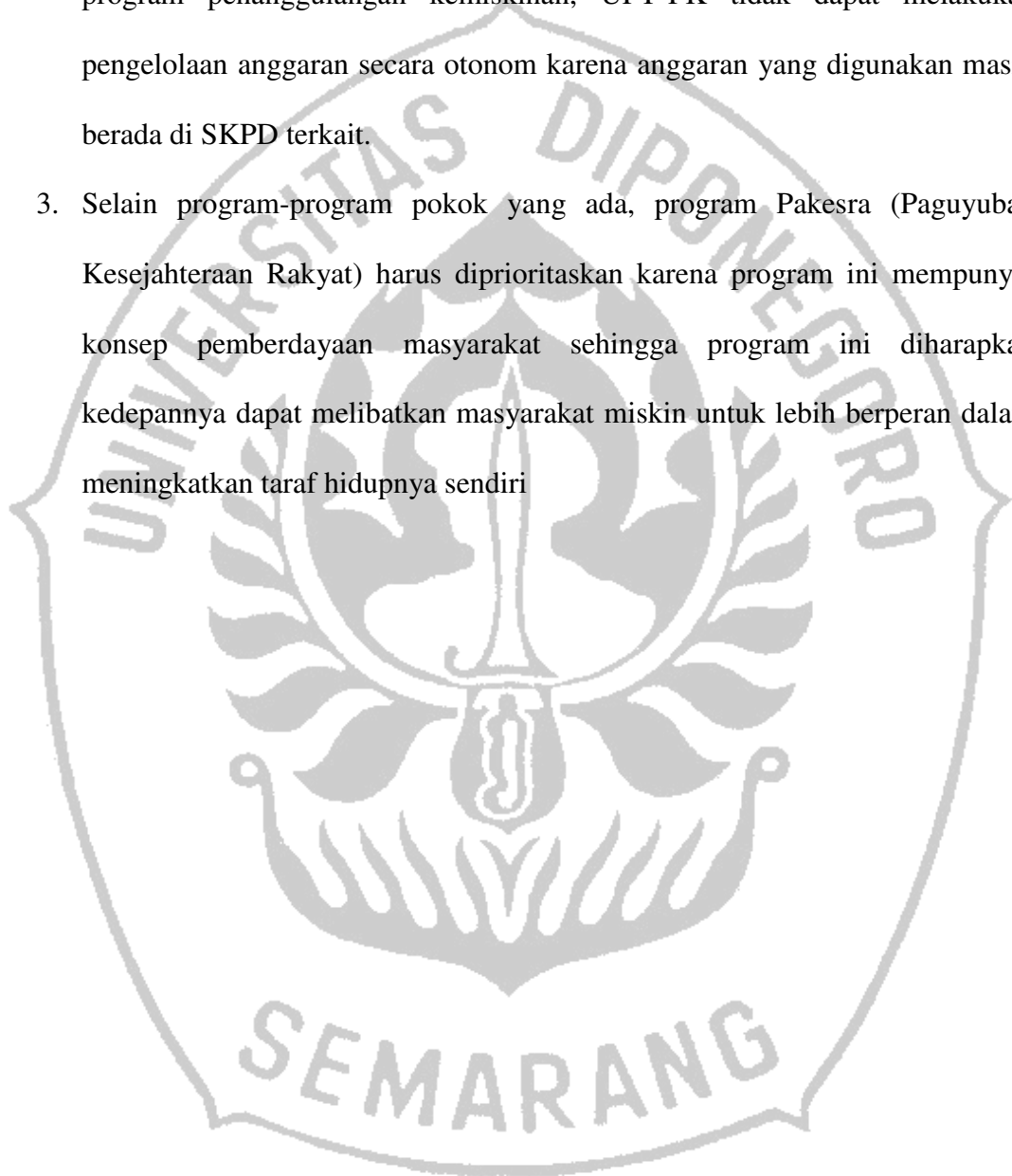
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut kaitannya dengan sarana dan prasarana, UPT-PK sudah mengajukan usulan ke pemerintah terkait untuk sarana dan prasarana. Untuk pengelolaan anggaran, karena UPT-PK masih berstatus sebagai unit, sejauh ini UPT-PK tidak bisa secara otonom untuk mengelolanya, sehingga koordinasi dengan dinas terkait menjadi upaya yang tepat untuk hal pengelolaan anggaran. Sedangkan dalam hal SDM, terkait masih sedikitnya jumlah petugas yang ada, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah memaksimalkan petugas yang ada, mengingat Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2012, semua petugas UPT-PK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Sedangkan agar tidak hanya masyarakat miskin yang mengajukan yang dilayani, UPT-PK sudah mengatasinya dengan melakukan validasi data.

C.1.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan saran dan rekomendasi untuk UPT-PK agar dalam melaksanakan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan bisa berjalan optimal, dan rekomendasi tersebut berupa:

1. Perlu dilakukannya *continuitas* atau keberlanjutan dari kegiatan validasi data minimal dua tahun sekali. Dengan validasi data ini, nantinya data yang akan diperoleh merupakan data yang benar-benar valid dan dapat dipercaya sehingga tidak ada lagi masalah *inclusion error* dan *exclusion error*, yang kedepannya secara otomatis program-program akan tepat sasaran.

2. Perlu meningkatkan status kelembagaan menjadi kantor, karena sejauh ini UPT-PK masih berstatus sebagai unit. Artinya, dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, UPT-PK tidak dapat melakukan pengelolaan anggaran secara otonom karena anggaran yang digunakan masih berada di SKPD terkait.
3. Selain program-program pokok yang ada, program Pakesra (Paguyuban Kesejahteraan Rakyat) harus diprioritaskan karena program ini mempunyai konsep pemberdayaan masyarakat sehingga program ini diharapkan kedepannya dapat melibatkan masyarakat miskin untuk lebih berperan dalam meningkatkan taraf hidupnya sendiri



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011
- Badjuri, Abdulkahar, Teguh Yuwono. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. 2003
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara. 2006
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012
- Huri, Daman dkk. *Demokrasi dan Kemiskinan*. Malang : Averroes Press. 2008
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga. 2004
- Mutaqien, Arip. *Menuju Indonesia Sejahtera : Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta : Khanata. 2006
- Pantja Astawa, I Gde, Supratin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2009
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005
- Sumarnonugroho, T. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : PT. Hanindita. 1984
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta : Med Press. 2008

Yunairi, Rusfi, Abdul Hakim, Adi Sumono. *Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2013

Jurnal :

Bahagijo, Sugeng. Menimbang Welfare State: Mencari Utopia Untuk Indonesia

Suharto, Edi. 2006. Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos

Suharto, Edi. Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?

Taufiq, Ahmad. Dinamika Kemiskinan di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam *Forum, Majalah Pengembangan Ilmu Sosial Forum FISIP UNDIP*. Vol. 35 – No. 2, Juni 2007

Internet :

Adamson, Goran. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Skandinavia*, dalam <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11?showall=1>, diakses pada tanggal 20 Desember 2012 pukul 23.07 WIB

Hukum tata negara, dalam <http://id.scribd.com/doc/48583240/HUKUM-TATA-NEGARA-Constitutional-Law>, diakses pada tanggal 21 Desember 2012 pukul 06.36 WIB

Lastomo, Agus Tri. *UPTPK, Harapan dan Hambatan*, dalam www.edisicetak.joglosemar.co/berita/uptpk-harapan-dan-hambatan-77938.html, diakses pada tanggal 11 November 2012 pukul 17.41 WIB

Nastiti, Kurnia Sari. *“Welfare State”*: Sejarah dan Perkembangannya, dalam

<http://id.scribd.com/doc/47842253/Welfare-States-Skandinavian-or-whom>,

diakses pada tanggal 30 Desember 2012 pukul 18.46 WIB

Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2012, dalam

http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=502:kemiskinan-1206&catid=29:2012

diakses pada tanggal 28 November 2012

pukul 23.22 WIB

<http://uptpk.sragenkab.go.id>

Artikel :

Rahayu, Tri, dkk. 2012. *Sragen Melawan Kemiskinan*, oleh dalam Solo Pos, Jumat 25 Mei 2012

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1)

Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Program Saraswati

Peraturan Bupati Sragen Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa PTN dari Keluarga Miskin

Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan RTLH

Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Uang Duka Cita